



Buletin Bappebti

Mengabdikan Dengan Integritas



INDONESIA
KERJA NYATA

TH

**JFX Siapkan Instrumen
Tax Amnesty**

**Perum Jamkrindo
Menggali 'Gurahnya' Bisnis
SRG Bulgaria**

**SRG + PLK
Ciptakan Kedaulatan
Pangan Nasional**

4-7

Berita Utama

-SRG + PLK

Ciptakan Kedaulatan Pangan Nasional

8-11

Berjangka

- 7 Institusi Cegah 'Investasi Bodong'
- Bappebti Luncurkan Aplikasi Pengaduan
- Volume Transaksi Melonjak 36 %
- JFX Optimis Lampau Target 2016

12-13

Resi Gudang

Perum Jamkrindo, Menggali 'Gurihnya' Bisnis SRG Bulgaria

14-15 Agenda Foto

16-17 Aktualita

- Mendag, Enggartiasto Lukita; Prioritaskan Stabilisasi Harga Pangan
- Kab. 50 Kota Gembira Ada SRG Gambir
- Izin Pengelola Pasar Lelang Bali Dibekukan
- Jamkrindo Petakan 23 Wilayah SRG di Sulawesi Hingga Papua

18 Analisa

19 Breaking News

20 Info

21 Info SRG

22-24 KomiKita

SRG dan Pasar Lelang Komoditi Part II



24-25 Kolom

Strategi Jitu Minimalisir Risiko



26-27 Kiprah

SRG Menjawab Problem Klasik Petani

Tips 7P

1. Pelajari latar belakang perusahaan yang menawarkan transaksi pada anda;
2. Pelajari tata cara bertransaksi dan penyelesaian perselisihan;
3. Pelajari kontrak berjangka komoditi yang akan diperdagangkan;
4. Pelajari wakil pialang yang telah mendapatkan izin dari Bappebti;
5. Pelajari isi dokumen perjanjiannya;
6. Pelajari risiko-risiko yang dihadapi.
7. Pantang percaya dengan janji-janji keuntungan tinggi.



Penerbit
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Penanggung Jawab
Bachrul Chairi

Redaktur
Didi Sumedi

Penyunting/ Editor
Taufik KS
Annisa F Wulandari
Aryo Guritno

Fotografer
Apriliyanto
Poppy Juliyanti
Gita Regina

Sekretaris
Katimin

Alamat Redaksi
Gedung Bappebti
Jl. Kramat Raya
No. 172, Jakarta Pusat.

www.bappebti.go.id

Redaksi menerima artikel ataupun opini dikirim lengkap dengan identitas serta foto ke E-mail:
humas.bappebti@kemendag.go.id



Foto : KaBag Kerjasama dan Informasi Publik, Taufik dan KaBag Penguatan dan Pemberdayaan Sistem Resi Gudang, Bappebti, Yuli Edi Subagio, berdiskusi tentang Sistem Resi Gudang dengan Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Indragiri Hilir.

Repatriasi dana warga negara Indonesia dari luar negeri saat ini menjadi buah bibir masyarakat terutama kalangan dunia usaha. Hal itu dipicu kebijakan pemerintah dan legislatif yang menerbitkan undang-undang pengampunan pajak- *tax amnesty*.

Terkait itu, sejumlah pemerhati pasar keuangan juga angkat bicara. Diantaranya ada yang mengusulkan agar dana yang masuk ke dalam negeri itu dikelola di sektor riil. Tentu alasannya adalah agar sektor riil yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional dapat tumbuh lebih cepat dan memiliki daya saing kuat.

Namun yang menjadi kendala saat ini adalah, pemerintah belum mempersiapkan payung hukum atau perangkat teknis pengelolaan dana *tax amnesty* masuk ke sektor riil.

Nyaris sama, industri perdagangan berjangka komoditi dan pasar fisik komoditi juga belum menjadi pilihan pemerintah untuk mengelola dana *tax amnesty*.

Menanggapi wacana yang menjadi buah bibir masyarakat itu, Dirut Jakarta Futures Exchange, Stephanus Paulus Lumintang, kepada Buletin Bappebti, mengatakan, seandainya pun pemerintah mengizinkan dana *tax amnesty* dikelola di industri perdagangan berjangka komoditi, bursa berjangka belum memiliki produk yang layak.

"Meski demikian, di internal kami sudah mencoba menggodok kira-kira produk apa yang tepat untuk pengelolaan *tax amnesty*.

Dan kelak gagasan itu sudah matang, kami akan ajukan proposal kepada otoritas," tambahnya.

Menurut kacamata Paulus Lumintang, produk bursa berjangka yang tepat menjadi pengelolaan dana *tax amnesty* adalah kontrak berjangka surat utang Negara.

Semoga saja dalam waktu yang tidak lama JFX dan otoritas mampu merumuskan produk kontrak berjangka yang menjadi sarana pengelolaan dana *tax amnesty*. Sehingga industri perdagangan berjangka dapat berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang dicanangkan pemerintah. Dan pada akhirnya dapat meningkatkan likuiditas pelaku pasar.

Pembaca Buletin Bappebti yang budiman, pada penerbitan buletin Edisi Juli, ini, Redaksi secara khusus membahas sistem resi gudang- SRG dan pasar lelang komoditi-PLK yang akan disinergikan di Provinsi Jawa Barat. Sinergi SRG dan PLK itu nantinya akan menjadi hajat nasional karena melibatkan sebanyak 16 kementerian dan lembaga. Di samping itu, saat peluncurannya pada bulan Oktober mendatang, direncanakan disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo.

Langkah pemerintah mensinergikan SRG dan PLK itu akan menjadi strategis menjaga kedaulatan pangan nasional. Dan juga, mengangkat bisnis SRG dan PLK ketataran nasional.

Salam!!!

Integrasi Sistem Resi Gudang & Pasar Lelang Komoditas



Kepala Bappebti, Bachrul Chairi didampingi Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan SRG dan PLK, Retno Rukmawati memimpin Rapat koordinasi Pilot Project Pengembangan Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK), hadir dalam kesempatan tersebut Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Pengamanan Pasar, Sutriyono Edi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat, Bank Indonesia Jawa Barat, dan PT Pos Indonesia.

SRG + PLK Ciptakan Kedaulatan Pangan Nasional

Sistem Resi Gudang- SRG dan Pasar Lelang Komoditi- PLK menjadi salah satu program unggulan dan prioritas Kementerian Perdagangan untuk menciptakan kedaulatan pangan.

Stabilisasi harga dan kecukupan pangan adalah impian setiap bangsa. Sebab, semakin kuat pertahanan suatu bangsa diantaranya akan tercermin dari kedaulatan pangannya. Dan untuk menciptakan kedaulatan pangan seperti yang diinginkan pemerintahan Presiden Joko Widodo, maka Kementerian Perdagangan melalui Bappebti akan mensinergikan SRG dan PLK.

Mengapa SRG dan PLK menjadi pilihan untuk menciptakan kedaulatan pangan? Karena SRG merupakan instrumen yang menyediakan data ketersediaan stok di setiap gudang SRG dan terintegrasi melalui suatu Sistem

Informasi Resi Gudang (IS-WARE) yang dikelola oleh Pusat Registrasi. Dan melalui IS-WARE, pemerintah dapat mengetahui ketersediaan dan komoditas di setiap wilayah lokasi gudang SRG. Sehingga dengan demikian SRG dapat menjadi instrumen pemerintah dalam mengambil kebijakan terkait dengan penyebaran dan penyediaan bahan pangan di berbagai wilayah. Di sisi lain, pemerintah pun bisa mengukur ketersediaan stok baik di tingkat lokal maupun nasional, khususnya komoditi pangan seperti beras, gabah dan jagung.

Sementara itu, PLK adalah mekanisme pasar yang fair, transparan, efisien dan efektif. Dengan karakteristik pasar yang

seperti itu, maka PLK akan menjadi instrumen yang dapat menjangkau pelaku usaha kecil atau pun petani dengan pasar yang begitu luas di berbagai wilayah.

Kepala Bappebti, Bahcrul Chairi, dalam keterangannya kepada media baru-baru ini, mengatakan, SRG dan PLK sangat sesuai dengan visi-nya bapak presiden. Yaitu, membangun mulai dari pinggiran dan terkait langsung dengan para petani atau pun UKM.

"Selama ini permasalahan yang dihadapi petani adalah tidak mendapatkan harga yang wajar di saat panen. Maka solusinya adalah SRG, karena dengan melakukan penyimpanan bisa memperoleh pembiayaan lembaga keuangan," jelas Bachrul.

Dan melalui PLK, tambahnya, petani akan memperoleh kepastian harga yang terbaik dari komoditas hasil panennya.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan kedaulatan pangan seperti yang diharapkan pemerintah, maka direncanakan pada bulan Oktober 2016, mendatang, diluncurkan *pilot project* sinergi SRG dan PLK di wilayah Jawa Barat.

"Dan direncanakan peluncuran *pilot project* sinergi SRG dan PLK itu akan disaksikan langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo," kata Bachrul.

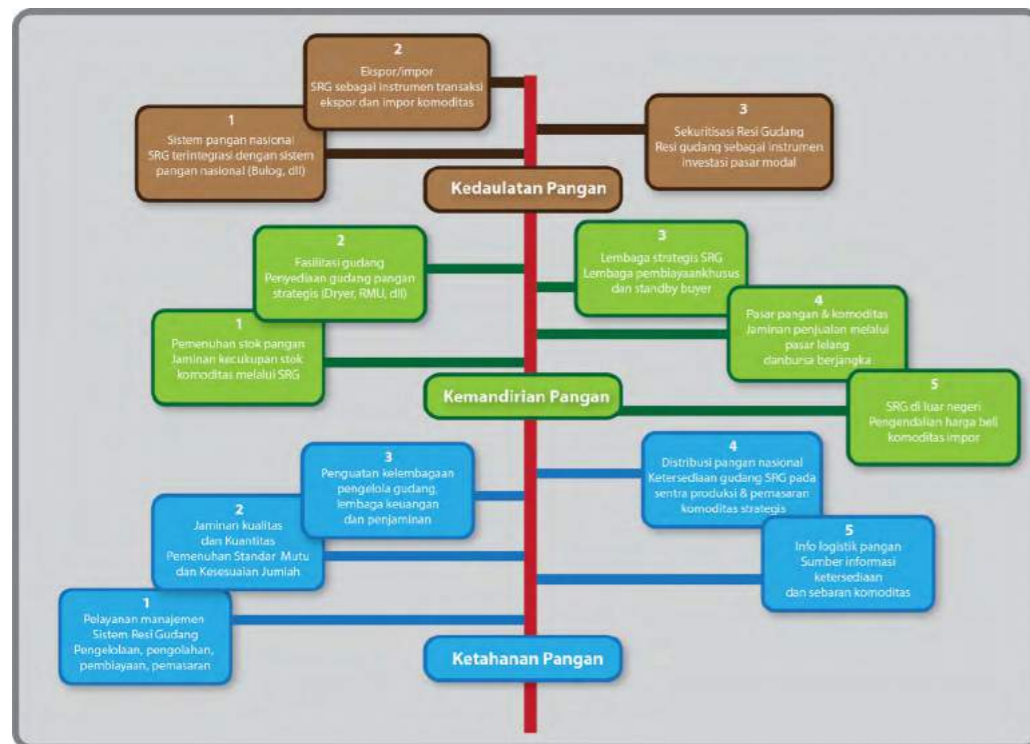
Menurut Bachrul Chairi, dipilihnya Jawa Barat sebagai percontohan sinergi SRG dan PLK dilatarbelakangi kesiapan daerah dengan ketersediaan gudang SRG yang memiliki berbagai fasilitas pendukung. Fasilitas pendukung yang dimaksud yakni, gudang SRG tersebut memiliki mesin pengering- *dryer* atau lantai jemur, *rice milling unit*- RMU, mesin sorter pemutih beras dan alat transportasi seperti truk untuk pengangkutan.

"Dengan menetapkan kriteria gudang SRG itu, pada tahap pertama kami memutuskan *pilot project* sinergi SRG dan PLK dilakukan di dua unit gudang SRG Jawa Barat. Sebenarnya ada delapan unit gudang SRG dari seluruhnya sebanyak 12 gudang SRG di Jawa Barat yang siap untuk dilakukan percontohan. Tetapi karena jangkauannya yang cukup luas, maka ditahap awal kami memutuskan di dua unit gudang SRG Jawa Barat," terang Bachrul.

Diharapkan dengan dua unit percontohan sinergi SRG dan PLK ini, tambah Bachrul Chairi, seluruh Pemda yang memiliki gudang SRG akan terdorong mendukung dan menyelenggarakannya.

"Sebab itulah beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan kepada para gubernur dan para bupati di seluruh Indonesia agar

Peran Sistem Resi Gudang mewujudkan ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan



SRG juga dapat berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah, melalui mekanisme tunda jual dan pembiayaan komoditas para petani yang selama ini memiliki posisi tawar lemah karena terbatasnya pilihan untuk memperoleh pembiayaan

SRG,” tegas Bachrul Chairi.

16 Instansi

Untuk mencapai hasil maksimal sinergi SRG dan PLK, Kementerian Perdagangan mengharapkan dukungan dari berbagai instansi terkait. Dukungan yang dimaksud seperti keluarnya berbagai kebijakan yang mendorong iklim kondusif sinergi SRG dan PLK.

“Misalnya dari sisi lembaga keuangan sebagai penyedia pembiayaan SRG, perlu ada kebijakan penurunan suku bunga bagi petani yang menggunakan SRG. Dan yang lebih penting lagi, perlu penerbitan peraturan terkait yang mempersyaratkan Resi Gudang sebagai bukti serapan komoditas sebagai prasyarat transaksi ekspor impor,” terang Bachrul.

Karena itu, tambah Bachrul, dari inventarisasi masalah kami sudah merumuskan ada sebanyak 16 instansi kementerian dan lembaga yang perlu memberi dukungan sinergi SRG dan PLK. “Dengan dukungan dari berbagai instansi itu, diyakini sinergi SRG dan PLK akan berjalan mulus sekaligus membawa harapan terwujudnya program kedaulatan pangan nasional,” imbuh Bachrul Chairi.

ikut mengembangkan SRG dan PLK di daerahnya masing-masing,” jelas Bachrul.

Empat Pilar

Untuk memuluskan rencana pilot project sinergi SRG dan PLK, Bappebti telah menandatangani nota kesepahaman kerjasama dengan Bank Indonesia Cabang Jawa Barat, PT Pos Indonesia dan Pemda Jabar yang diwakili dinas perdagangan.

Dalam kerjasama itu, PT Pos Indonesia selaku Pengelola Gudang SRG di Kab. Tasikmalaya dan Ciamis, Jawa Barat, juga diarahkan sebagai Penyelenggara Lelang Komoditas, sehingga dapat menggunakan aplikasi Pasar Lelang Terpadu yang telah dikembangkan Bappebti. “Saat ini aplikasi Pasar Lelang Terpadu tengah disiapkan Bappebti. Dan diperkirakan dalam waktu dekat aplikasi itu sudah bisa dilakukan uji coba,” papar Bachrul.

“Dengan keterlibatan PT Pos Indonesia sebagai Pengelola Gudang SRG dan penyelenggara PLK, akan berpeluang menghimpun informasi ketersediaan dan kebutuhan komoditas di seluruh Indonesia. Karena PT Pos memiliki jaringan luas dengan sekitar 4.200 unit cabang di berbagai daerah,” terang Bachrul.

Di samping itu, PT Pos juga dapat mengintegrasikan bisnisnya mulai dari pengelolaan gudang, penyelenggaraan Pasar Lelang, hingga pengiriman barang untuk realisasi transaksi PLK online, tambah Bachrul.

Sedangkan kerjasama dengan Bank Indonesia Cabang Jawa Barat, akan mengoptimalkan peran Tim Pengendali Inflasi Daerah- TPID Jawa Barat untuk mendukung pelaksanaan SRG, dengan mendorong kelembagaan yang terhimpun pada TPID di Jawa Barat. Dan dipihak Pemda Jabar, diharapkan bisa mendorong terbitnya kebijakan daerah

untuk mengoptimalkan pelaksanaan SRG dan PLK.

“Bicara tentang peran TPID, SRG sebagai surat berharga akan dapat memberikan nilai tambah terhadap komoditas yang disimpan di gudang SRG. Sebab, adanya persyaratan kualitas komoditi yang disimpan di gudang SRG, di sisi lain akan meningkatkan daya saing komoditas unggulan daerah baik di pasar domestik maupun internasional,” kata Bachrul.

Selain itu, SRG juga dapat berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah, melalui mekanisme tunda jual dan pembiayaan komoditas para petani yang selama ini memiliki posisi tawar lemah karena terbatasnya pilihan untuk memperoleh pembiayaan, katanya.

“Sehingga melalui SRG, para petani maupun pelaku UKM memiliki alternatif pembiayaan dengan memanfaatkan

Rencana Aksi Tahun 2016

Bappebti

- Penyusunan regulasi
- Menyiapkan infrastruktur Sistem Informasi SRG dan PLK (PL Online)
- Sosialisasi SRG kepada Pelaku Usaha, K/L dan Pemerintah daerah
- Penguatan kapasitas kelembagaan SRG dan PLK (Pelatihan dan Pendampingan)
- Mengkoordinasi penyiapan *launching Pilot Project* Percepatan dan Pengembangan Pelaksanaan SRG di Jawa Barat

Bank Indonesia

- Optimalisasi peran Tim TPID
- Mendorong pembuatan kebijakan daerah
- Sosialisasi, Edukasi dan Pendampingan kepada petani/poktan, koperasi dan pelaku usaha
- Penguatan peran pelaku usaha ekonomi kerakyatan
- Mengkoordinasikan implementasi SRG dengan pimpinan daerah (Bupati dan jajarannya) dan pihak perbankan

Pemerintah Daerah

- Pembuatan kebijakan daerah untuk memfasilitasi percepatan implementasi SRG
- Pengembangan mutu komoditas unggulan daerah
- Penguatan peran pelaku usaha ekonomi kerakyatan
- Koordinasi lintas SKPD
- Penyiapan Anggaran APBD

PT Pos Indonesia

- Pengajuan Permohonan sebagai Penyelenggara Pasar Lelang
- Pemanfaatan kantor Pengelola Gudang untuk Kantor Retail Pos dan penjualan Sarana Produksi Pertanian (Saprotan)
- Pemanfaatan sarana logistik yang dimiliki PT POS INDONESIA untuk menunjang transportasi komoditas SRG
- Layanan jasa keuangan melalui kerjasama dengan Lembaga Keuangan



7 Institusi Cegah 'Investasi Bodong'

Tujuh institusi negara sepakat memperkuat kerjasama dalam Satgas Waspada Investasi untuk mencegah dan menangani maraknya tawaran dan praktik investasi ilegal. Untuk terhindari dari praktik 'investasi bodong', kata kuncinya adalah Legal dan Logis.

Satuan Tugas Waspada Investasi yang terdiri dari kementerian dan lembaga terkait, kembali memperkokoh komitmen bersama dan menyusun payung hukum dalam pelaksanaan tugas pokok sebagai Satgas Waspada Investasi. Institusi yang tergabung di Satgas itu adalah Otoritas Jasa Keuangan- OJK; Bappebti, Kementerian Perdagangan; Kementerian Komunikasi dan Informatika; Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; Kejaksaan; Kepolisian RI; serta Badan Koordinasi Penanaman Modal- BKPM.

Bentuk komitmen dari tujuh institusi tersebut, dituangkan dalam Nota Kesepakatan tentang Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi. Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh pimpinan tujuh institusi yang tergabung dalam Satgas Waspada Investasi, di Jakarta, 21 Juni 2016, lalu.

Selain itu, anggota Satgas Waspada Investasi juga sepakat untuk membentuk Tim Satgas Waspada Investasi di tingkat

daerah dengan perwakilan anggota dari lembaga yang sama dengan Satgas Waspada Investasi di pusat. Tim Satuan Tugas Waspada Investasi Daerah berfungsi sebagai sarana koordinasi antara Kantor Regional/Kantor Otoritas Jasa Keuangan dengan instansi/dinas di pemerintah daerah terkait.

Legal dan Logis

Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam Lumban Tobing, menjelaskan, Nota Kesepakatan antar pimpinan institusi anggota Satgas Waspada Investasi disusun sebagai payung hukum Satgas untuk memperkokoh komitmen bersama antara Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan tugas pokok Satgas Waspada Investasi.

Adapun revitalisasi pelaksanaan tugas Satgas Waspada Investasi antara lain meliputi: Pertama, preventif. Tindakan ini meliputi koordinasi antara anggota Satgas Waspada Investasi dalam rangka meningkatkan edukasi dan pemahaman mengenai ruang lingkup transaksi keuangan yang berpotensi

merugikan masyarakat; sosialisasi kepada komponen masyarakat, penegak hukum, pemerintah daerah dan akademisi; mengidentifikasi dan mengevaluasi serta tindakan yang diperlukan terhadap penawaran investasi melalui berbagai sarana pemasaran tidak terbatas kepada penyampaian melalui internet; serta mengefektifkan sarana pengaduan Satgas Waspada Investasi.

Kedua, kuratif. Tindakan ini meliputi kerjasama dalam penerbitan ijin keramaian atau penyelenggaraan kegiatan penawaran investasi; melakukan pembinaan berupa peringatan terhadap perusahaan yang melakukan penawaran investasi yang berpotensi merugikan masyarakat agar mendapatkan ijin dan beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga, represif. Diantaranya melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan dan perundang-undangan.

"Nota kesepakatan itu akan memperkuat peran Satgas. Koordinasi di lapangan diharapkan semakin efektif," kata Togam L. Tobing.

Menurut Togam L. Tobing, untuk terhindar dari 'investasi bodong' masyarakat secara sederhana bisa mempelajarinya dengan dua cara. Yakni, melihat dari sisi legalitasnya dan apakah penawaran keuntungan investasi itu logis. "Kalau legalitas pihak penawar investasi sudah meragukan, maka masyarakat seharusnya sudah menolak penawaran itu," terangnya.

"Untuk mengetahui legalitas perusahaan yang menawarkan investasi itu, bisa di akses ke www.waspadainvestasi.ojk.go.id," kata Togam.

"Langkah kedua yakni logis. Di mana pun, bisnis investasi apa saja tidak akan mungkin memberi keuntungan di atas yang sewajarnya dari lembaga keuangan. Jadi, kalau ada penawaran investai dengan menjanjikan keuntungan besar dan berbagai bonus, maka sudah sepatutnya penawaran itu dicurigai legalitasnya," pungkas Togam L. Tobing.



Bappebti Luncurkan Aplikasi Pengaduan

Untuk memperkuat integritas industri PBK, Bappebti meluncurkan aplikasi penanganan pengaduan nasabah secara online, www.pengaduan.bappebti.go.id.

Di era reformasi birokrasi, Bappebti terus berupaya berbenah diri. Satu contoh, di bidang manajemen pengaduan nasabah, Bappebti telah mengembangkan aplikasi berbasis online. Aplikasi ini dikelola dan diawasi oleh Bappebti, yang dapat digunakan langsung kepada Pialang Berjangka.

Langkah tersebut, dilakukan dalam rangka mendukung proses penanganan pengaduan nasabah sesuai Peraturan Kepala Bappebti Nomor 125/BAPPEBTI/PER/11/2015 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Nasabah.

Untuk itu, Bappebti telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 132/BAPPEBTI/SE/06/2016 tentang Pemberlakuan Aplikasi Pengaduan Nasabah Secara Online. Peraturan itu mewajibkan bursa berjangka dan pialang berjangka untuk menggunakan aplikasi pengaduan nasabah secara online terhitung mulai tanggal 15 Juli 2016.

"Maksud dan tujuan dari Surat Edaran ini adalah terwujudnya penanganan pengaduan nasabah secara online oleh bursa berjangka dan pialang berjangka, sehingga penanganan

pengaduan nasabah dapat dilakukan secara tepat, cepat, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada nasabah," kata Kepala Bappebti, Bachrul Chairi dalam Surat Edaran Nomor 132/BAPPEBTI/SE/06/2016, yang ditandatangani pada tanggal 28 Juni 2016.

Bachrul mengatakan, aplikasi pengaduan nasabah secara online memiliki manfaat antara lain sebagai berikut: Memberikan pelayanan pengaduan yang cepat, tanggap dan akurat; mendukung transparansi dan akuntabilitas pelayanan pengaduan nasabah; mendukung reformasi birokrasi manajemen pengaduan; meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan pengaduan nasabah.

Adapun pengaduan secara elektronik online dilakukan oleh nasabah dengan cara: Pertama, melakukan pengaduan sendiri dengan mengakses alamat website pengaduan online: www.pengaduan.bappebti.go.id.

Kedua, datang langsung ke Pialang/Bappebti/Bursa; a) Pialang/Bappebti/Bursa mengarahkan nasabah untuk menginput permohonan pengaduan di aplikasi pengaduan

pengaduan.bappebti.go.id; atau b) Pialang membantu nasabah dalam menginput pengaduan di aplikasi pengaduan di www.pengaduan.bappebti.go.id.

Ketiga, mengirimkan surat dan/atau email ke pialang, lalu pialang melakukan penginputan data permohonan pengaduan ke dalam aplikasi di www.pengaduan.bappebti.go.id/internal.

Selain mengisi data pengaduan, kata Bachrul, nasabah juga wajib melengkapi pengaduan dengan dokumen paling sedikit: 1) Softcopy kronologis atau uraian pengaduan; 2) Scan identitas nasabah; 3) Scan surat kuasa, apabila pengaduan dilakukan oleh kuasanya; 4) Scan perjanjian amanat; 5) Scan laporan harian transaksi; dan 6) Scan bukti transfer dana.

Selanjutnya, dokumen tersebut diverifikasi oleh pialang berjangka. Untuk dokumen yang tidak lengkap, pialang berjangka wajib membantu nasabah untuk melengkapi kekurangan dokumen dimaksud. "Pialang berjangka wajib menginformasikan kepada nasabah tentang tata cara dan prosedur penggunaan aplikasi pengaduan nasabah secara online," tegas Bachrul dalam Surat Edaran tersebut.

Volume Transaksi Melonjak 36 % JFX Optimis Lampau Target 2016

Tanpa dorongan produk baru, volume transaksi JFX pada semester pertama 2016 meningkat 36 %. Dengan tambahan produk baru di periode semester dua, diprediksi volume transaksi JFX makin besar.

Jakarta Futures Exchange – JFX terus menunjukkan tren positif volume transaksi kontrak berjangka pada semester pertama 2016. Meningkatnya volume transaksi kontrak berjangka JFX itu adalah buah dari berbagai strategi dan juga kerja keras para pelaku pasar.

Mengacu pada data volume transaksi kontrak berjangka JFX hingga akhir Juni 2016, total transaksi mencapai 2.834.506,3 lot, atau mengalami peningkatan 36,1 % dibandingkan tahun 2015 (*year on year*). Bila dirinci, kontrak berjangka multilateral tercatat sebanyak 416.882 lot (26,7 %) dan kontrak berjangka bilateral sebanyak 2.417.624,3 lot (26,4 %). Sedangkan di periode yang sama tahun 2015, kontrak berjangka multilateral hanya mencapai 305.265 lot dan kontrak bilateral sebesar 1.777.227,7 lot.

Sementara itu, kontrak berjangka multilateral JFX yang mencapai kinerja maksimal pada semester pertama 2016, ini, adalah kontrak Gulir Indeks Emas yang mencapai 24.452 lot. Meningkat 71,8 % dari tahun 2015 yang hanya sebanyak 6.888 lot. Setelah itu, kontrak berjangka Olein- minyak goreng 20 ton sebanyak 35.437 lot, meningkat 66,3 % atau sebanyak 11.922 di semester pertama 2015. Selanjutnya, kontrak berjangka Kopi Robusta sebanyak 132.729 lot, meningkat 16,5 % dari 110.750 lot.

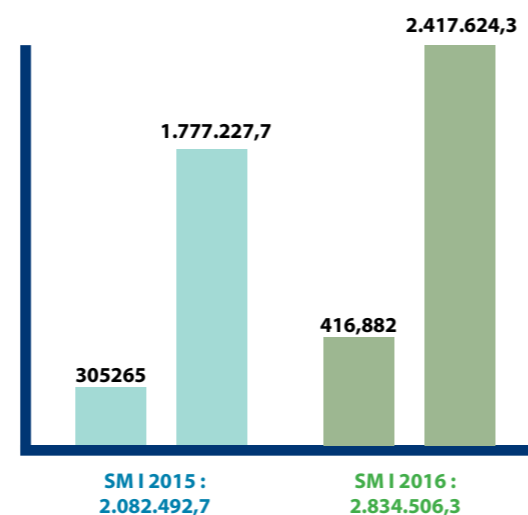
Sedangkan kontrak berjangka multilateral JFX yang mengalami

Multilateral

Kontrak	TOTAL SMI 2015	TOTAL SMI 2016
OLEIN 20 TON	11922	35.437
OLEIN 10 TON	11339	19.157
BERJANGKA EMAS 1 KG	706	290
BERJANGKA EMAS 100 GR	23892	27.827
BERJANGKA EMAS 250 GR	54741	87.880
GULIR INDEKS EMAS	6888	24.452
GULIR EMAS RP	158	2
GULIR EMAS USD	3270	3.286
GULIR EMAS (MINI) USD	20578	15.104
GULIR EMAS (FIX) USD	824	182
KAKAO 5 TON	26059	19.987
KOPI ROBUSTA	110750	132.729
KOPI ARABIKA	34070	50.175
BERKALA EMAS 5 GR	52	275
BERKALA EMAS 10 GR	16	28
BERKALA EMAS 25 GR		5
BERKALA EMAS 50 GR		22
BERKALA EMAS 100 GR		44
TOTAL 1	305265	416,882

Bilateral

Kontrak	TOTAL SMI 2015	Kontrak	TOTAL SMI 2016
Forex	544.249,3	Forex	588.904,8
Index	331.796,8	Index	323.067,2
Single Stock	33.996,0	Single Stock	347.990,0
Commodity	42.698,1	Energy	76.665,0
Loco	824.487,5	Precious Metal	915,6
-	-	Loco	1.080.081,7
TOTAL	1.777.227,7	TOTAL	2.417.624,3



penurunan kinerja adalah kontrak Kakao 5 ton. Tercatat pada semester pertama 2016 hanya sebanyak 19.987 lot, pada hal di periode yang sama 2015 terdapat sebanyak 26.059 lot atau turun 30,3 %

Dirut JFX, Stephanus Paulus Lumintang, kepada **Buletin Bappebti**, mengatakan, pihaknya tetap optimis

kinerja volume transaksi kontrak berjangka hingga akhir tahun tumbuh dengan tren positif. "Sepanjang tahun ini seperti diperkirakan banyak analisis, bahwa harga dari berbagai komoditas di pasar internasional masih sangat rendah dan belum menjadi pilihan utama para pelaku pasar."

"Tetapi meski begitu, kami tetap yakin pelaku pasar di dalam negeri bisa mencapai targetnya dengan berbagai langkah yang sudah dijalankan JFX, seperti revitalisasi kontrak berjangka dan akan diluncurkannya produk-produk terbaru," jelas Paulus.

Lebih jauh dikatakan Paulus, hal yang positif dari pertumbuhan volume kontrak berjangka JFX itu adalah semakin banyak pelaku pasar perseorangan yang bertransaksi dengan inisiatif sendiri. "Tren ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin mengenal dan mengerti manfaat *hedging*- lindung nilai."

Menanggapi turunnya volume transaksi kontrak berjangka kakao JFX, Paulus Lumintang, menjelaskan, hilirisasi industri kakao cukup berhasil di dalam negeri. "Namun harap dicatat, pelaku hilir industri kakao yang menyerap produksi kakao di dalam negeri adalah pelaku asing. Dan mereka selama ini telah melakukan lindung nilai di bursa berjangka luar negeri. Itulah antara lain yang mengakibatkan turunya volume transaksi kakao," katanya.

Terkait belum terealisirnya sejumlah program peluncuran produk baru yang sudah direncanakan sejak akhir tahun 2015, Paulus Lumintang, mengatakan, "kami menginginkan peluncuran produk terbaru JFX benar-benar siap 100 %."

"Kami tidak menginginkan begitu produk tersebut diluncurkan tetapi

JFX Siapkan Instrumen Tax Amnesty

Repatriasi dana warga Indonesia yang diprogramkan pemerintah dengan kebijakan tax amnesty- pengampunan pajak diperkirakan akan berimbas ke industri perdagangan berjangka komoditi di dalam negeri. Seperti diketahui, hingga Maret 2017 pemerintah menargetkan repatriasi dana masyarakat mencapai Rp 165 triliun.

"Kami bersama otoritas saat ini sedang mengkaji produk yang tepat untuk menampung dana tax amnesty," ucap Dirut Jakarta Futures Exchange- JFX, Stephanus Paulus Lumintang, kepada **Buletin Bappebti**, baru-baru ini.

Menurut Paulus Lumintang, produk yang tepat untuk menampung dana tax amnesty adalah produk berbasis keuangan seperti surat utang negara. "Tepatnya produk apa yang akan disiapkan JFX, saatnya akan diberitahukan kepada media. Karena saat ini masih dalam tahap penggodokan. Jadi masih rahasia perusahaan 'lah," katanya berseloroh.

Meski demikian, Paulus Lumintang agak pesimis industri perdagangan berjangka komoditi bisa menampung dan mengelola lebih banyak dana tax amnesty. "Kalau pun nantinya produk JFX itu telah siap, saya berkeyakinan tak sampai 1 % bisa masuk ke bursa berjangka," katanya.

"Sedangkan untuk kontrak berjangka yang saat ini sudah diperdagangkan baik itu produk multilateral dan maupun bilateral, pastinya para pemilik dana akan mencari produk yang likuid," terang Paulus.

Lebih jauh diutarakan Paulus, yang pasti dengan adanya program tax amnesty aka ada dana segar di masyarakat. Dan itu akan berdampak signifikan pada pertumbuhan perekonomian. "Nah, kalau perekonomian bertumbuh industri perdagangan berjangka pun akan kebagian ikut tumbuh, sebab masyarakat akan memiliki banyak dana," ucap Paulus Lumintang.

kemudian *mandek* di tengah jalan yang dikarenakan ada sesuatu hal yang belum beres, jadi lebih baik mundur peluncurannya. Tetapi kami targetkan hingga akhir tahun akan ada produk terbaru yang diluncurkan," terang Paulus.

Ditambahkan Paulus, Pasar Fisik Komoditi Teh sebenarnya sudah siap diluncurkan karena sudah memperoleh izin dari otoritas. Hanya saja ada permasalahan internal dari pelaku usaha teh di dalam negeri, sehingga hal itu mengganjal diluncurkannya Pasar Fisik Teh.

Sedangkan untuk Pasar Fisik Komoditi Kopi, saat ini masih dalam proses penyusunan PTT- peraturan tata tertib. "Tetapi mungkin dalam waktu dekat Pasar Fisik Komoditi Kopi sudah siap

diluncurkan," ujar Paulus.

Untuk kontrak berjangka syariah, Paulus Lumintang, berkomentar, "kontrak berjangka syariah sudah *on the track* tinggal *final touch*."

"Pelaku pasar kontrak berjangka syariah itu adalah kalangan perbankan syariah. Oleh karena itu, untuk dapat bertransaksi di bursa berjangka mereka harus memperoleh persetujuan dari badan otoritasnya. Dan saat ini menurut informasi yang kami terima, perizinan itu sedang dalam proses. Jadi, kalau perbankan syariah mendapatkan izin itu, maka kami akan segera meluncurkan kontrak berjangka syariah," terang Stephanus Paulus Lumintang.



Perum Jamkrindo Menggali 'Gurahnya' Bisnis SRG Bulgaria

Perum Jamkrindo mendapat amanah dari pemerintah sebagai lembaga penjamin SRG, langsung 'tancap gas' melakukan kajian dan menggali gurahnya bisnis SRG yang telah terselenggara sejak 1997 di Bulgaria.

Implementasi Sistem Resi Gudang- SRG di Indonesia harus diakui belum berjalan optimal. Meskipun sudah muncul sejak 2006 silam, gema instrumen SRG hingga kini gaungnya masih kecil terdengar dan belum memberikan daya tarik bagi industri terkait. "SRG yang ada di Tanah Air masih belum bisa menarik para pelaku industri terkait untuk mengembangkannya," demikian analisa dari Direktur Utama Perusahaan Umum Jamkrindo, Diding S Anwar di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Melihat kondisi tersebut, Perum Jamkrindo yang tahun ini mendapat kepercayaan sebagai Lembaga Pelaksana Penjaminan SRG, melakukan kunjungan kerja untuk mengkaji SRG hingga ke benua Eropa tepatnya di negara Bulgaria. "Perum Jamkrindo perlu melakukan kunjungan lapangan untuk bertemu langsung dan berdiskusi dengan beberapa stakeholder terkait di negara yang dinilai telah berhasil melaksanakan SRG dengan perlindungan *Indemnity Fund*," ujar Diding.

Mengapa harus ke Bulgaria?

Menurut Diding, negara ini telah sukses menerapkan SRG. Di sana, semua petani diwajibkan untuk menyimpan hasil panennya di gudang sehingga ketersediaan pangan nasional dan kestabilan harga komoditas bisa terus terpantau. Hal ini terbukti, instrumen SRG yang telah diprogramkan pemerintah Bulgaria sejak tahun 1997, saat ini sudah bisa berdiri sendiri tanpa ada subsidi yang disuntikan kembali.

"Kesuksesan Bulgaria menerapkan SRG membuat kami tertarik untuk mempelajarinya. Kunjungan lapangan dan diskusi langsung dengan para pelaku di Bulgaria dirasa akan cukup membekali Perum Jamkrindo untuk mengembangkan SRG di dalam negeri," ujar Diding.

Dia menambahkan, kunjungan itu dilakukan untuk memperoleh gambaran utuh mengenai pelaksanaan SRG yang telah dilengkapi dengan *indemnity fund*. Selain itu juga untuk memperoleh referensi dalam menyiapkan berbagai hal terkait dengan pelaksanaan instrumen tersebut.

Diding juga membeberkan, dari

hasil kunjungan itu didapatkan bahwa penerapan SRG yang ada di Indonesia dan yang ada di Bulgaria memiliki tujuan yang berbeda. Meski demikian, proses yang dilakukan tidak berbeda sehingga penerapannya pun tidak akan mengalami kesulitan.

Mengatasi Krisis Pangan

SRG yang diterapkan di Bulgaria awalnya dilakukan untuk mengatasi krisis pangan yang terjadi saat itu. Tidak hanya itu, Pemerintah Bulgaria juga mampu untuk meningkatkan produksi pangan dan mengontrolnya melalui instrumen ini. Dengan SRG, minat petani untuk melakukan budidaya komoditas pangan sesuai dengan standar kualitas dan kuantitas juga bisa ditingkatkan. SRG juga dapat membuat petani berhubungan langsung dengan perbankan guna memperoleh pembiayaan, baik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ketika harga sedang rendah maupun untuk pembiayaan perdagangan- modal kerja.

Dari gudang-gudang yang dikunjungi, *Atriko Warehouse Operator* dan *Agromill Warehouse*, Perum Jamkrindo menilai bahwa gudang tadi tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan, melainkan tempat di mana para petani bisa mendapatkan kepastian untuk bisa mendapatkan pinjaman dari pihak perbankan.

Pola kerja sama antara petani, gudang, dan perbankan yang didukung oleh perusahaan penjaminan dinilai akan lebih mudah dan menguntungkan. Di mana resi gudang yang diterbitkan oleh tempat penyimpanan bisa dijamin ke pihak perbankan dan kredit dapat segera dikururkan. Disanalah perusahaan penjaminan memiliki peran penting untuk menjamin pengelolaan gudangnya dan juga menjamin penyaluran kredit dari perbankan tadi. Dari sudut pandang perbankan, pelaksanaan SRG sangat membantu petani. Bank dapat dengan mudah



memberikan pembiayaan, keberadaan dana jaminan juga meningkatkan kepercayaan bank untuk memberikan pembiayaan dalam skema SRG ini.

Tunda Jual

Meski begitu, lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya. Menurut Diding, penerapan SRG yang ada di Bulgaria memang tidak akan sepenuhnya bisa diterapkan di dalam negeri. "Tujuan yang berbeda juga mempengaruhi penerapan sistem ini," katanya.

"Di Indonesia, tujuan utama diterapkan SRG adalah untuk mengangkat derajat petani. Selama ini, petani selalu ada di posisi tawar paling bawah. Setiap hasil panen dari petani hampir selalu dipermainkan harganya, terutama oleh para tengkulak," terang Diding.

Diding menambahkan, SRG merupakan salah satu instrumen yang dapat dimanfaatkan oleh para petani, kelompok tani, gapoktan, koperasi tani maupun pelaku usaha (pedagang, prosesor dan pabrikan) sebagai suatu instrumen tunda jual dan pembiayaan perdagangan karena dapat menyediakan akses kredit bagi dunia usaha dengan jaminan barang (komoditi) yang disimpan di gudang.

"Dengan tersedianya mekanisme jaminan pada SRG, maka pengelola gudang akan mampu melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan

barang yang disimpan jika terjadi kelalaian yang menyebabkan kegagalan Pengelola Gudang. Di sinilah peran Perum Jamkrindo diperlukan, untuk menjamin pengelolaan gudang tadi," ungkap Diding S Anwar.

Untuk itu, penerapan penjaminan dalam pelaksanaan SRG perlu didukung dengan regulasi dan ketentuan yang tidak merugikan salah satu pihak. Badan pengawas dalam hal ini adalah Bappebti, memiliki peran penting dalam menentukan apakah suatu kondisi dapat dikategorikan sebagai wanprestasi yang dilindungi dana jaminan. Keputusan untuk menentukan hal tersebut juga perlu dilakukan dengan cepat.

Meski langkah-langkah persiapan dalam mengelola SRG sudah tersusun dengan baik, namun pelaksanaan ini masih menanti campur tangan pemerintah. Diding pun kembali menegaskan, pihaknya baru akan menjalankan peran sebagai Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang setelah dana Penyertaan Modal Negara- PMN cair.

"Pemerintah menganggarkan PMN sebesar Rp 705 miliar dan dana operasional sebesar Rp 82 miliar bagi Perum Jamkrindo untuk melaksanakan penjaminan SRG. Saat ini, masalah PMN masih dalam proses legislasi di DPR," imbuh Diding S. Anwar.



DPRD Kabupaten Inhil Konsultasi SRG ke Bappebti

Kepala Bagian Kerjasama dan Informasi Publik, Taufik dan Kepala Bagian Penguatan dan Pemberdayaan Sistem Resi Gudang, Yuli Edi Subagio mewakili Sekretaris Bappebti menerima kunjungan kerja anggota Komisi II DPRD Kabupaten Indragiri Hilir ke kantor Bappebti, Rabu (20/07).

Kunjungan tersebut bermaksud untuk melakukan konsultasi dalam rangka penyusunan peraturan daerah tentang Sistem Resi Gudang khususnya Komoditi Kopra. Sebab, pada tahun ini pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/5/2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/11/2011 tentang Barang yang dapat disimpan di Gudang dalam Penyelenggaraan SRG, dimana Kopra termasuk dalam satu komoditi yang dapat disimpan di Gudang SRG.



Silaturahmi dan Halal Bihalal Idul Fitri 1437 H di Lingkungan Bappebti

Kepala Bappebti, Bachrul Chairi bersama Jajaran Eselon II Bappebti serta seluruh Pegawai Bappebti mengadakan acara Silaturahmi dan Halal Bihalal Idul Fitri 1437 H yang diselenggarakan di Gedung Bappebti, Selasa (12/07).

"Dengan momentum Hari Raya Idul Fitri diharapkan sebagai awal memperbaharui semangat, dan menjadikan semangat Idul Fitri ini sebagai semangat kemenangan, semangat kerja baru, semangat untuk kita meningkatkan kualitas kinerja," kata Bachrul.

Kegiatan rutin tahunan ini merupakan apresiasi pimpinan Bappebti terhadap pegawainya yang merayakan lebaran, serta untuk menjalin tali silaturahmi yang lebih erat lagi antara pimpinan/pejabat dengan para pegawai.

Hadir dalam kesempatan tersebut Staf Ahli Menteri Perdagangan Bidang Pengamanan Pasar, Sutriyono Edi, Kepala Bappebti dari periode sebelumnya yang sudah purnatugas, dan Pejabat Eselon II Kementerian Perdagangan serta Pegawai Bappebti baik yang masih aktif maupun yang sudah Purnatugas.



Halal Bihalal Pelaku Usaha PBK

Kepala Bappebti, Bachrul Chairi didampingi Pejabat Eselon II dan III Bappebti menghadiri sekaligus memberikan pengarahan dalam acara halal bihalal dengan PT. Bursa Berjangka Jakarta (BBJ), PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) serta para pelaku usaha Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) di Jakarta, Rabu (13/7).

Dalam sambutannya Kepala Bappebti mengharapkan agar pelaku usaha PBK dapat melihat peluang pengembangan industri PBK. "Peningkatan edukasi masyarakat dan peningkatan citra (*image building*) industri PBK merupakan tanggung jawab bersama antara regulator dan pelaku usaha," tuturnya.

Acara halal bihalal dihadiri oleh dewan komisaris dan direksi PT BBJ, PT KBI, Ketua Aspebtindo, para direksi perusahaan pialang berjangka dan direksi dari bank penyimpanan dana margin.



Satgas Waspada Investasi Gelar Rapat Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum

Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti, Sri Hariyati menghadiri Rapat Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi (Waspada Investasi), di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Selasa (19/07).

Rapat itu dihadiri oleh anggota Tim Satgas yakni Bareskrim Polri, Kejaksaan Agung, Kemenkop UKM, OJK, Kemenkominfo, dan Kementerian Perdagangan (Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi, Direktorat Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, dan Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti).

Adapun rapat tersebut membahas tindak lanjut atas penanganan beberapa kasus dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi, serta rencana penyusunan dan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Satgas Waspada Investasi dengan Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI).



Mendag, Enggartiasto Lukita; Prioritaskan Stabilisasi Harga Pangan

Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, menargetkan stabilisasi harga kebutuhan pokok sebagai prioritas jangka pendek dalam masa kepemimpinannya. "Stabilisasi harga pangan pokok adalah prioritas utama yang ditugaskan pak presiden kepada saya," katanya.

Terkait itu, Kementerian Perdagangan akan mengajak para pengusaha untuk mendukung kebijakan tersebut dengan memberikan insentif berupa jaminan keberlanjutan usaha.

"Dalam waktu secepatnya kami akan melakukan koordinasi antar kementerian dan lembaga dalam menyusun strategi stabilisasi harga. Kami akan minta waktu bertemu menteri pertanian, Bulog dan juga BPS- Badan Pusat Statistik untuk minta data kemudian ditindaklanjuti," ujar Enggartiasto Lukita kepada media usai serah terima jabatan Menteri Perdagangan dari Thomas Trikasih Lembong, di Gedung Kementerian Perdagangan, 27 Juli 2016.

Di samping persoalan stabilisasi harga kebutuhan pokok seperti beras, daging dan bawang, misi jangka pendek yang juga harus segera diselesaikan adalah evaluasi revitalisasi pasar tradisional yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara- APBN. "Kita ketahui pak presiden sangat berpihak pada sektor riil, maka saya pun diminta untuk memantau revitalisasi pasar tradisional," katanya.



Sebelum menjabat sebagai Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita adalah politisi Nasdem. Lahir di Cirebon, Jawa Barat, 12 Oktober 1951 dan menyelesaikan pendidikan jurusan Bahasa Inggris pada 1977 dari Fak. Pendidikan Bahasa dan Seni, IKIP Bandung (Universitas Pendidikan Indonesia- UPI).

Kab. 50 Kota Gembira Ada SRG Gambir

Pasca ditetapkannya komoditi gambir sebagai salah satu komoditi sistem resi gudang- SRG, Pemda Kab. Lima Puluh Kota, Sumatera Barat, bermaksud mengalihkan dua unit gudang SRG yang semula untuk komoditi pangan menjadi gudang gambir. Pengalihan itu sangat beralasan, dikarenakan Kab. Lima Puluh Kota merupakan produsen utama komoditi gambir dunia dengan pangsa pasar berkisar 80 %. Sedangkan pesaing utama Indonesia di pasar internasional untuk komoditi gambir adalah India, Banglades dan Pakistan.

"Kab. Lima Puluh Kota merupakan satu-satunya daerah di Indonesia yang produksi komoditi gambir, dan 100 % dibudidayakan oleh petani. Meski begitu, harga gambir di pasar internasional selalu berfluktuasi yang disebabkan rendahnya mutu akibat perubahan iklim," jelas KaBag Penguatan dan Pemberdayaan SRG, Bappebti, Yuli Edi Subagio.

Karena adanya permintaan dari Pemda Kab. Lima Puluh

Kota, itu, tambah Yuli Edi, maka Bappebti akan mendukung. Dan dalam waktu dekat ini, Pemda Lima Puluh Kota akan lakukan berbagai pertemuan untuk percepatan implementasi SRG gambir. "Kalau melihat antusiasnya Pemda Lima Puluh Kota, hingga akhir tahun ini sepertinya bisa diimplementasikan SRG gambir," katanya.

"Permasalahan yang dihadapi saat ini hanyalah bank pembiayaan SRG. Tetapi saya cukup optimis permasalahan itu bisa diatasi, karena ada komitmen dari BRI Sumbar," ujar Yuli Edi.

Menurut Yuli Edi Subagiyo, Pemda Kab. Lima Puluh Kota tak hanya ingin implementasikan SRG gambir, melainkan juga berencana mendirikan Pasar Lelang Komoditi Gambir.

"Kalau Pasar Lelang Komoditi Gambir itu bisa direalisasikan dengan SRG gambir, maka besar harapan Indonesia akan menjadi pasar gambir terbesar di dunia. Dan dengan begitu, Indonesia bisa kendalikan harga gambir dunia," imbuhnya.

Izin Pengelola Pasar Lelang Bali Dibekukan

Bappebti selaku pembina dan pengawas pasar lelang komoditi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, membatalkan izin Koperasi Pegawai Negeri Praja, Pemprov Bali, sebagai penyelenggara pasar lelang dengan penyerahan kemudian- *forward*. Keputusan itu tertuang pada SK Kepala Bappebti No. 01/BAPPEBTI/KEP-PEMBATALAN PL/SAI07/2016, tertanggal 25 Juli 2016.

Sebelum keputusan Kepala Bappebti itu diterbitkan, Ketua Koperasi Pegawai Praja mengirimkan pemberitahuan tertanggal 1 Juli 2016 kepada Kepala Bappebti dan disusul rekomendasi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Bali, tertanggal 11 Juli 2016.

KaBag Penguatan dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas, Bappebti, Sentot Komaruddin, dalam penjelasannya membenarkan bahwa Koperasi Pegawai Negeri Praja, Pemprov Bali, dalam beberapa waktu belakangan tak lagi menyelenggarakan pasar lelang komoditas. Hal itu dikarenakan sejumlah masalah yang membelit penyelenggara pasar lelang komoditas di Pulau Dewata itu.

"Pengakuan yang kami terima dari pengurus koperasi itu, diketahui mereka tidak memiliki SDM- Sumber Daya Manusia yang siap dan mampu menyelenggarakan pasar lelang komoditas. Di samping itu, dalam operasionalnya selama ini koperasi tersebut lebih fokus kepada unit usaha simpan pinjam," jelas Sentot.

Karena mereka tak punya SDM mengelola pasar lelang, tambah Sentot, maka mereka kesulitan untuk mencari para pelakunya. Akibatnya pasar lelang komoditas Bali tak lagi diselenggarakan secara rutin.

"Meski begitu, Dinas Perindag Bali tetap berkomitmen untuk menyelenggarakan pasar lelang komoditas di masa mendatang. Saat ini pun Dinas Perindag Bali diketahui sedang mencari dan melakukan seleksi calon pengelola pasar lelang. Dan kami pun sangat berharap pasar lelang komoditas Bali tetap beroperasi, karena kita ketahui Bali juga memiliki sejumlah komoditi potensial dan sekaligus menjadi pasar dengan potensi wisatanya," ujar Sentot Komaruddin.

Jamkrindo Petakan 23 Wilayah SRG di Sulawesi Hingga Papua



Perum Jamkrindo telah memetakan 23 gudang Sistem Resi Gudang- SRG di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua yang berpotensi dijamin oleh perseroan dalam pelaksanaan penjaminan resi gudang.

Kepala Kantor Jamkrindo Wilayah IX yang mencakup Sulawesi, Maluku dan Papua, Hamim Bugi Afianto, mengatakan, seluruh gudang tersebut telah mengantongi persetujuan sebagai gudang SRG dan telah menampung sejumlah komoditas yang dipersyaratkan. Kendati demikian, lanjutnya, pelaksanaan penjaminan SRG belum bisa dilakukan lantaran masih menunggu petunjuk teknis dari kantor pusat, kepastian

bentuk dana penjaminan hingga dana operasional yang direncanakan bersumber dari Penyertaan Modal Negara- PMN.

"Kita sudah melakukan survey ke seluruh daerah operasional Kanwil IX, di mana sejauh ini terdapat 23 SRG yang memungkinkan kita jamin jika pelaksanaan penjaminan SRG sudah kita lakukan," ujar Afianto kepada media baru-baru ini.

Dalam penjelasan Hamim, gudang SRG yang dijangkau Perum Jamkrindo Wilayah IX sebagian besar terkonsentrasi di Regional Sulawesi dengan jumlah mencapai 21 unit. Sedangkan untuk Regional Maluku dan Papua masing-masing terdapat 1 unit gudang SRG. "Gudang SRG yang terbanyak di Wilayah IX Jamkrindo ada di Sulawesi Selatan sebanyak 10 unit. Kemudian Sulawesi Utara 4 unit, sedangkan selebihnya tersebar pada provinsi-provinsi di wilayah kerja Jamkrindo," katanya.

"Kami sangat berharap di semester kedua tahun ini pelaksanaan penjaminan SRG sudah berjalan efektif di Wilayah IX. Sebab penjaminan SRG akan ikut mendorong performa penjaminan perseroan secara menyeluruh yang selama ini ditopang oleh penjaminan KUR maupun non-KUR," papar Hamim Bugi Afianto.

Indonesia Terancam Krisis Kopi

Produktivitas biji kopi Indonesia terus menurun. Akibatnya, saat ini peringkat Indonesia turun menjadi nomor tiga terbesar penghasil kopi di dunia setelah digeser Vietnam yang baru mengembangkan kopi.

Sentra kopi Kab. Bener Meriah, Aceh, yang selama ini dikenal sebagai salah satu penghasil kopi diketahui menghadapi krisis karena hampir 50 % tanaman kopi dari 46.000 hektar sudah merupakan tanaman tua. Selain menua, sebagian besar tanaman kopi juga terkena serangan hama.

"Hama bubuk buah menjadi momok buat petani dan juga jamur akar putih," ujar Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bener Meriah, Ahmad Ready, baru-baru ini kepada media. Penurunan produktivitas kopi sudah mulai terasa di wilayah Aceh dan Sumatera Utara. "Hal itu dapat dilihat dari eksportir kopi kesulitan memenuhi kontrak sebesar 100 kontainer atau sekitar 2.000 ton kopi setiap tahunnya ke manca Negara," kata Ahmad Ready.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno, dalam sebuah kesempatan mengatakan, saat ini di Sumatera Barat mayoritas tanaman kopi telah berumur di atas 15 tahun dan beberapa di antaranya tidak terawat dengan baik. Sehingga produktivitasnya kurang dari 600 kg per hektare per tahun.

Selain itu kondisi lahan juga semakin berkurang kesuburannya karena dieksploitasi terus menerus tanpa adanya upaya konservasi lahan. "Saya mengkhawatirkan bahwa produksi



ini akan terus mengalami penurunan jika tidak adanya upaya penyelamatan kopi rakyat," ujar Irwan Prayitno.

Hal yang sama juga dikatakan Gubernur NTT, Frans Lebu Raya. Dikatakan Frans Lebu, produksi perkebunan kopi rakyat di NTT cenderung menurun setiap tahunnya karena sudah berumur tua.

"Jika tidak diselamatkan, maka produksi kopi kita akan menurun dan posisi Indonesia sebagai produsen kopi terbesar ketiga bukan tidak mungkin merosot terus, seperti yang terjadi pada berbagai komoditas perkebunan lainnya," papar Frans Lebu Raya.

BK CPO Turun 5,02 %, Kakao Naik 1,15 %



Harga referensi produk CPO untuk penetapan bea keluar- BK periode bulan Agustus 2016 sebesar USD 676,24 per metrik ton. Dibandingkan periode Juli 2016, BK CPO turun 5,02 % dari USD 711,98 per metrik ton.

Penetapan itu diatur melalui Permendag No. 50/M-DAG/PER/7/2016 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar.

"Saat ini, harga referensi CPO kembali turun dan di bawah ambang batas pengenaan BK di level USD 750. Untuk itu, pemerintah mengenakan BK untuk CPO sebesar USD 0 per metrik ton untuk periode Agustus 2016," kata Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Dody Edward, di Jakarta baru-baru ini.

Sementara itu, harga referensi biji kakao pada bulan Agustus 2016 naik sebesar USD 35, atau 1,15 % dari USD 3.043,95 per metrik ton menjadi USD 3.078,95 per metrik ton. Hal ini berdampak pada penetapan HPE biji kakao yang juga naik USD 34 atau 1,2 % dari USD 2.743 per metrik ton, sehingga pada periode bulan Agustus 2016 menjadi USD 2.777 per metrik ton.

Kenaikan harga referensi dan HPE biji kakao itu disebabkan oleh naiknya harga kakao di pasar internasional. Namun, BK biji kakao tidak berubah dibandingkan periode bulan sebelumnya, yaitu sebesar 10 %.

Financial Service Authority targeted Warehouse Receipt System securitization

The commissioner of Finance Service Authority (OJK), Muliaman D.Hadad, trusts that in the future Warehouse Receipt System (SRG) can be herded to capital market as funding source or tools by securitization.

"Therefore Indonesia will be the first country who apply securitization of warehouse receipt for commodity sector," Muliaman explained in the middle of his speech on warehouse receipt's person meeting in Jakarta.

Moreover Muliaman said that securitization became important to do as agricultural sector often seen as *unbankable* by banking sector. This has caused difficulty for farmers to get funding access from banking.

Besides that, those capital limitation is not only happened in agricultural sector, the other sector such as marine also has it. Therefore, farmers and fishermen bargain position became very weak on the harvest time. "Nowadays farmers' contribution on PDB (Gross domestic product) only about 14%. However, agricultural sector becomes important asset for Indonesian economy as its capability to absorb 28 million citizen or about 31% of workforce," Muliaman said.



In Muliaman's brain, to lead securitization of warehouse receipt to capital market it needs to sit together to make the blueprint. "I hope in the near future we can sit together to draw up the blueprint of warehouse receipt securitization."

"So that in the next 2 years we will be able to run warehouse receipt system securitization at the capital market. Therefore, socialization and education on warehouse receipt system needs to be upgraded as people knowledge towards warehouse receipt system is still very low," Muliaman D.Hadad added.

Tin, Gambier, Tea and Cora become commodity subjects of Warehouse Receipt System



The commodity that becomes the storage subject at SRG warehouse, regulated by *Permendag No.35/M-Dag/Per/5/2016* are Tin, Gambier, Tea and Copra commodity.

With the 4 commodities addition, there are 14 commodity in total as SRG's subject. There are unhulled rice, rice, corn, coffee, cocoa, pepper, rubber, seaweed, rattan, salt, tin, gambier, tea and copra. That regulation was issued by Trading Ministry on the 12 of Mei 2016 and effected on 24th of Mei 2016

Coftra's coaching and supervision Chief of warehouse receipt system and commodity auction market, Retno Rukmawati on one of the occasion said the commodity that can become SRG's subject needs to come from local government's proposal. Therefore local government has interest to maintain the mentioned commodity price stability.

"Still the decision is at the trading ministry with considering its economic benefit and fluctuate price characteristic," Retno Rukmawati explained.

The Optimization of goods or commodity storage through SRG system was done by Trading Minister, Thomas T.Lembong by issuing *Permendag No.35/M-Dag/per/5/2016* on goods that are allowed to be stored in warehouse on SRG management.



0811-1109-901
SMS CENTER
BAPPEBTI

Jimmy Tan, Pontianak, Kalbar

0811114xxxx

Tanya;

Kepada Yth Bappebti;

Saat ini saya tercatat sebagai salah satu karyawan bank nasional cabang Pontianak, nyaris setiap hari saya dihubungi melalui telepon seluler oleh tenaga marketing yang menawarkan investasi komoditi emas di bursa berjangka. Dari penawaran yang disampaikan memang agak rasional. Namun saya masih meragukan legalitas perusahaan tersebut. Untuk dapat mengetahui dan memastikan legalitas perusahaan tersebut, apa yang harus saya lakukan?

Jawaban:

Yth Bapak Jimmy, tahap awal untuk memasuki investasi perdagangan berjangka adalah memeriksa legalitas dari perusahaan yang menawarkan investasi. Jadi, langkah Bapak untuk mengetahui legalitas perusahaan pialang berjangka adalah langkah yang tepat. Untuk dapat mengetahui daftar perusahaan pialang berjangka yang memiliki izin resmi dari Bappebti, Bapak bisa mengakses www.bappebti.go.id. Dalam kesempatan ini kami juga menyampaikan, untuk pengaduan nasabah perusahaan pialang berjangka dapat disampaikan melalui www.pengaduan.bappebti.go.id.

Semoga dengan penjelasan ini dapat memenuhi harapan Bapak.

Terimakasih.

Layanan SMS Center BAPPEBTI

Jika Anda mempunyai informasi atau pertanyaan mengenai kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditi (PLK) sesuai dengan tupoksi BAPPEBTI Kementerian Perdagangan, dapat disampaikan melalui SMS 0811-1109-901

Dengan format NAMA (spasi) DOMISILI (spasi) ALAMAT EMAIL (spasi) PESAN

*SMS dikenakan biaya regular (tergantung dari masing-masing provider telepon)

Glossary

1. Cover To

Cancel a short position in any future by the purchase of an equal quantity of the same future. Also known as short covering.

2. Covered Write

The sale of call option against an existing long underlying position.

3. Credit Risk

Describes the general risk that the counterparty will default and not honour the contract.

4. Cross Hedge

A futures hedge in which the asset underlying the futures contract differs from the asset being hedged.

5. Cross To

Buy and sell simultaneously in the same contract month for the same commodity.

6. Crush Spread (Crushers)

A position entailing long soybean futures contracts and short soybean oil and soybean meal futures contracts in fixed proportions. Its name replicates the positions taken by soybean processors when hedging the later purchase of inputs and sale of products.

7. Current Delivery

The futures contract which matures and becomes deliverable during the present month; also called spot month.

8. Cyclic Analysis

Analysis that uses various repetitive patterns such as seasonality and time based sequences as a basis to determine the future direction of trends and prices.

9. Daily Price Limits

Barriers which indicate the cessation of trading for that day, if those limits are reached.

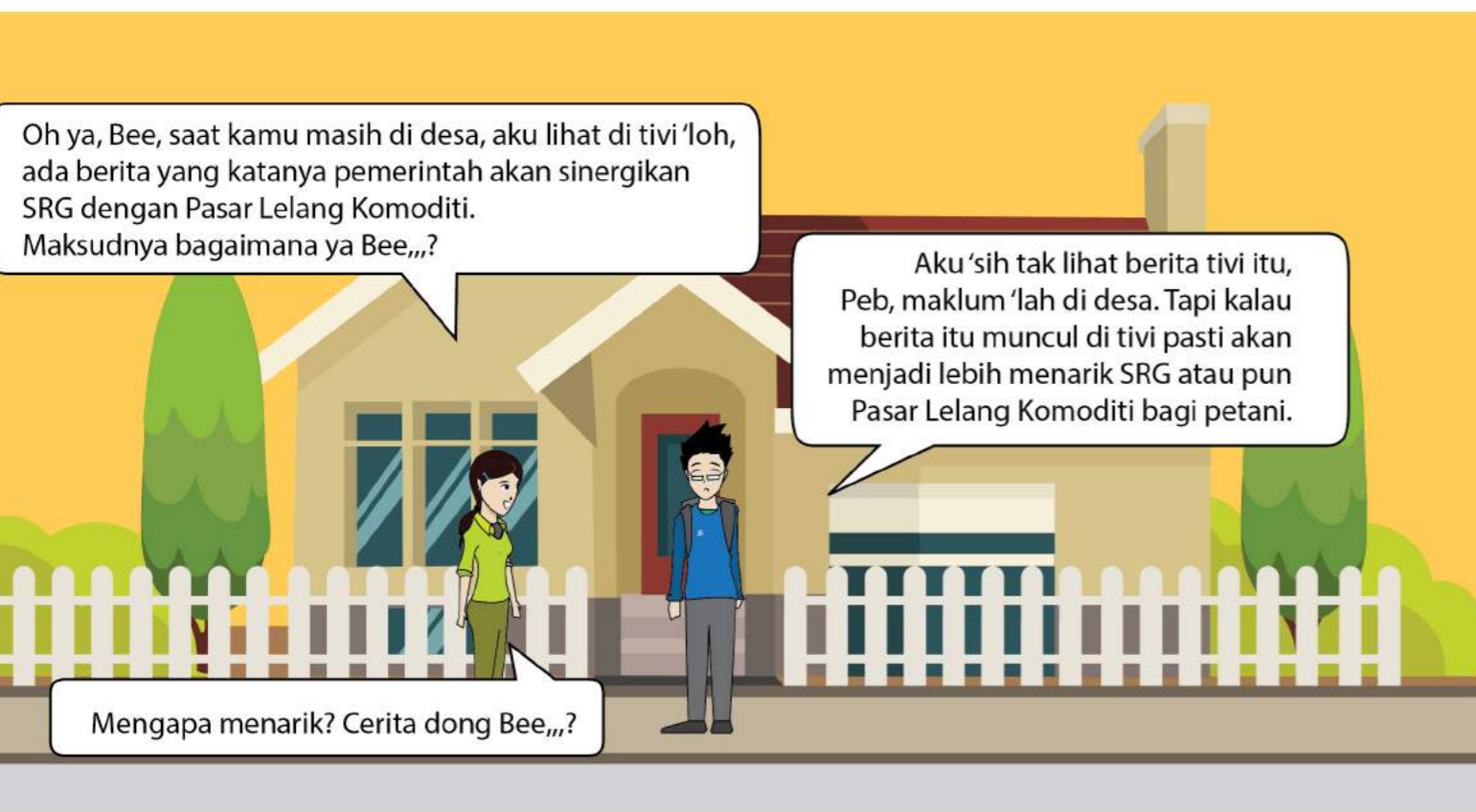
10. Daily Trading Limit

The maximum price range set by the exchange cash day for a contract.

REKAPITULASI RESI GUDANG 2016

NO	PENGELOLA GUDANG / GUDANG	PENERBITAN				PEMBIAYAAN		
		Jumlah Resi Gudang	Komoditi	"Volume Komoditi (Ton)"	Nilai Barang	Jumlah Resi Gudang	Bank/LKNB	Nilai
I	PT. Bhandha Ghara Reksa (Persero)							
	- Gudang Aceh Tengah	2	Kopi	50	Rp3.000.000.000	2	BRI cabang Takengon	Rp2.100.000.000
	- Gudang Wonogiri	2	Gabah	42	Rp216.000.000	1	Bank Jateng cabang Wonogiri	Rp46.000.000
	- Gudang Pemalang	8	Gabah	112,889	Rp643.960.400	7	Bank Jateng cabang Pemalang	Rp408.000.000
	- Gudang Bener Meriah	1	Kopi	28,3	Rp1.556.500.000	0	-	Rp-
	- Gudang Katingan	1	Rotan	20,418	Rp183.762.000	0	-	Rp-
	- Gudang Pasaman Barat	1	Jagung	2	Rp10.000.000	0	-	Rp-
	- Gudang Bireuen	5	Gabah	157,22	Rp829.466.000	0	-	Rp-
	- Gudang Kediri	2	Gabah	28,51	Rp107.290.000	0	-	Rp-
	- Gudang Kuningan	3	Gabah	60	Rp300.000.000	2	BJB cabang Kuningan	Rp130.000.000
	- Gudang Tapin	1	Gabah	10,066	Rp45.297.000	1	Bank Kalsel cabang Rantau	Rp31.000.000
	- Gudang Probolinggo	2	Gabah	27,346	Rp111.228.900	1	BRI cabang Probolinggo	Rp25.000.000
	- Gudang Banyuasin	2	Gabah	35,7	Rp124.950.000	1	BJB cabang Palembang	Rp70.000.000
	- Gudang Banyuwangi Sempu	4	Gabah	58,628	Rp351.768.000	4	Bank Jatim cabang Banyuwangi	Rp246.002.000
	- Gudang Pidie	1	Gabah	20	Rp100.000.000	0	-	Rp-
	- Gudang Demak (Mulyorejo)	2	Gabah	78,61	Rp387.509.500	0	-	Rp-
	- Gudang Malang	1	Gabah	20,07	Rp90.315.000	0	-	Rp-
	- Gudang Bantul	1	Gabah	5,989	Rp29.346.100	0	-	Rp-
	- Gudang Sambas	1	Gabah	4	Rp17.600.000	0	-	Rp-
	- Gudang Purworejo	2	Gabah	6,693	Rp30.787.800	0	-	Rp-
II	Kospermindo							
	- Gudang Makassar (Kospermindo)	1	Rumput Laut	25	Rp150.000.000	0	-	Rp-
III	PT. Food Station Tjipinang Jaya							
	- Gudang Daya Tani Ngawi	9	Beras	862,5	Rp6.956.250.000	0	-	Rp-
	- Gudang Bogor	4	Gabah	33,776	Rp152.700.200	0	-	Rp-
	- Gudang Indramayu Losarang	2	Gabah	93,898	Rp419.873.000	0	-	Rp-
	- Gudang CV. Sandy Jaya Indramayu	2	Gabah	614,55	Rp2.765.475.000	1	PKBL KBI	Rp1.000.000.000
IV	PT. Pos Indonesia (Persero)							
	- Gudang Tasikmalaya	17	Gabah	303,5	Rp1.642.750.000	12	BJB cabang Singaparna, PKBL KBI	Rp817.950.000
		18	Jagung	486	Rp1.944.000.000	12	BJB cabang Singaparna	Rp900.000.000
	- Gudang Ciamis	1	Gabah	5,2	Rp37.960.000	0	-	Rp-
V	Koperasi Niaga Mukti							
	- Gudang Cianjur	23	Gabah	453,78	Rp2.826.989.000	23	BJB cabang Cianjur	Rp1.961.250.000
VI	PT. Pertani (Persero)							
	- Gudang Kudus (Medini)	2	Gabah	35	Rp192.500.000	2	Bank Jateng cabang Kudus	Rp130.000.000
	- Gudang Tuban	3	Gabah	54,8	Rp246.600.000	1	Bank Jatim cabang Tuban	Rp60.000.000
	- Gudang Grobogan	3	Gabah	48,6	Rp247.590.000	1	Bank Jateng cabang Purwodadi	Rp70.000.000
	- Gudang Kudus (Jekulo)	1	Gabah	30	Rp165.000.000	0	-	Rp-
	- Gudang Jepara	1	Gabah	15	Rp82.500.000	0	-	Rp-
	- Gudang Jember	2	Gabah	60	Rp300.000.000	0	-	Rp-
		98	Gabah	2.415,83	Rp12.465.455.900	57		Rp4.995.202.000
		9	Beras	862,50	Rp6.956.250.000	0		Rp-
		19	Jagung	488,00	Rp1.954.000.000	12		Rp900.000.000
		3	Kopi	78,30	Rp4.556.500.000	2		Rp2.100.000.000
		1	Rumput Laut	25,00	Rp150.000.000	0		Rp-
		1	Rotan	20,42	Rp183.762.000	0		Rp-
	TOTAL	131		3.890,04	Rp26.265.967.900	71		Rp7.995.202.000

SRG dan Pasar Lelang Komoditi Part II





Strategi Jitu Minimalisir Risiko

Donny Raymond*)

Risiko menjadi hal yang pasti dihadapi seorang investor. Apa pun jenis investasi yang dipilih, tak terkecuali di bidang perdagangan berjangka komoditi pasti mengandung risiko. Sebab itu, hal pertama yang harus diketahui sebelumnya memutuskan memilih investasi perdagangan berjangka komoditi adalah menakar tingkat risiko yang akan dihadapi.

Namun, Anda tak perlu khawatir. Karena pada dasarnya risiko itu bisa diminimalisir. Terkait itu, di artikel ini penulis ingin berbagi strategi meminimalisir risiko yang tepat pada investasi perdagangan berjangka komoditi.

Transaksi perdagangan berjangka

komoditi pada hakikatnya adalah suatu aktivitas perdagangan. Strategi untuk meminimalisir risiko pun akan serupa dengan strategi pada perdagangan biasa.

Memperhitungkan jumlah dana yang dimiliki untuk diinvestasikan pada kontrak berjangka, mengatur strategi volume pada tiap-tiap transaksi yang akan dilakukan, menganalisa pergerakan harga pasar, transaksi yang dilakukan secara bertahap, adalah merupakan strategi jitu yang dapat diterapkan untuk mengelola risiko investasi perdagangan berjangka komoditi.

Selain itu, fasilitas yang tersedia dalam sebagian besar *platform* perdagangan berjangka juga bisa digunakan untuk

meminimalisir potensi risiko yang dihadapi. Fasilitas amanat transaksi seperti *stop-limit order* bisa membantu nasabah mengoptimalkan potensi transaksi.

Stop-limit order merupakan amanat transaksi bersyarat yang baru diaktivasi bila harga di pasar bergerak mencapai kondisi tertentu. Sehingga bilamana pergerakan harga tiba-tiba membalik secara cepat dan berpotensi merugikan, maka *stop-limit order* bisa teraktivasi dan membatasi potensi kerugian secara cepat.

Di samping itu, kuncinya adalah *stop-limit* biasanya digunakan untuk mengantisipasi pergerakan harga yang

tidak sesuai dengan posisi transaksi yang dimiliki nasabah.

Sebab itu, bursa berjangka (*Jakarta Futures Exchange- JFX*) mewajibkan seluruh anggota pialang untuk mengedukasi calon nasabahnya. Pialang tidak hanya dalam hal peluang yang akan didapat disampaikan kepada calon atau pun nasabahnya, namun juga tingkat risikonya.

Sebagai bursa berjangka, JFX juga mengingatkan kepada calon nasabah bahwa sebelum melakukan investasi perdagangan berjangka nasabah berhak mendapat penjelasan dari Wakil Pialang Berjangka atas isi Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko- *Risk Disclosure Statement*.

Dalam mekanisme perdagangan berjangka komoditi, Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko adalah dokumen yang menjelaskan risiko-risiko yang berpotensi dihadapi oleh nasabah, di mana salah satunya adalah potensi kerugian yang jauh lebih besar dari nilai awal yang diinvestasikan oleh nasabah. Oleh sebab itu, sebelum transaksi dilakukan di perusahaan pialang berjangka calon nasabah harus benar-benar memahami dan menandatangani dokumen tersebut.

Margin

Perlu juga diketahui oleh calon nasabah, bahwa investasi pada perdagangan berjangka komoditi menggunakan margin yang

“Memperhitungkan jumlah dana yang dimiliki untuk diinvestasikan pada kontrak berjangka, mengatur strategi volume pada tiap-tiap transaksi yang akan dilakukan, menganalisa pergerakan harga pasar, transaksi yang dilakukan secara bertahap, adalah merupakan strategi jitu yang dapat diterapkan untuk mengelola risiko investasi perdagangan berjangka komoditi.”

menimbulkan *leverage*, atau daya ungkit yang memperbesar potensi keuntungan ataupun di sisi lain kerugian dari suatu pergerakan harga. Margin ini adalah ciri khas dari perdagangan berjangka komoditi.

Dalam praktiknya, semakin besar *leverage* dalam suatu transaksi, maka semakin besar pula efek yang dihasilkan suatu perubahan harga. Bila suatu kontrak berjangka menggunakan margin, misalnya sebesar 5 % dari nilai aktual asset yang ditransaksikan, maka nilai margin tersebut akan menghasilkan *leverage* sebesar 20 kali. Itu artinya, setiap 1 % perubahan harga akan mengakibatkan 20 % perubahan nilai margin.

Karena banyaknya faktor yang mempengaruhi harga suatu komoditas, maka harga *underlying asset* yang berubah setiap waktu sehingga potensi tingkat pengembalian yang dipengaruhi *leverage* juga akan berubah setiap waktu.

Setelah mendapat pemahaman tentang margin dari Wakil Pialang Berjangka, hal lain yang penting diketahui calon nasabah adalah menggali informasi sebanyak-banyaknya tentang subjek kontrak berjangka komoditi yang bakal ditransaksikan. Kemudian berbagai informasi itu dipelajari dan segala aspek transaksi perdagangan berjangka harus dipahami sebelum memulai transaksi sebagai tahapan awal meminimalisir risiko.

Bagi masyarakat umum, pelajar yang tertarik untuk mempelajari investasi perdagangan berjangka komoditi sebelum menjadi nasabah dari perusahaan pialang berjangka, JFX dengan cuma-cuma membuka kelas edukasi. Informasi lebih lanjut tentang kelas edukasi tersebut, dapat menghubungi JFX. *) *Direktur Jakarta Futures Exchange*



Bambang Mugiarto

SRG Menjawab Problem Klasik Petani

Lahir dan tumbuh besar di lingkungan petani, membuat Bambang Mugiarto begitu peka terhadap nasib para petani. Karena itu, dia pun bertekad membawa Koperasi Tani Makmur Sejahtera sebagai Pengelola Gudang SRG yang handal dan terdepan.

Gairah Kab. Pemalang untuk mengimplementasikan Sistem Resi Gudang- SRG mulai terlihat. Secara perlahan, pemerintah daerah setempat sepertinya tak mau menya-nyikan keberadaan gudang SRG yang telah dibangun dari dana APBN tersebut. Di sini, terdapat gudang SRG yang persisnya berada Jl. Slamet Riyadi Desa Pelutan Kec. Pemalang, Kab. Pemalang.

Meski saat ini pengelolaan gudangnya masih dipegang oleh PT Bhandha Ghara Reksa (Persero), tapi Pemda Kab. Pemalang telah menunjuk satu calon pengelola gudang dari daerahnya sejak Oktober 2015 lalu. Pengelola Gudang itu yakni Koperasi Tani Makmur Sejahtera-TMS yang anggotanya merupakan Gabungan Kelompok Tani yang tersebar di Kab. Pemalang.

Di balik Koperasi TMS, ada satu nama yakni Bambang Mugiarto yang

berperan penting sebagai nahkodanya. Dia dipercaya menjadi ketua Koperasi TMS sejak awal 2016 lalu. "Masuknya saya sebagai pengurus karena ada pengurus yang mundur sebelum masa jabatannya berakhir. Sebagai anggota koperasi, saya dipilih untuk menggantikannya hingga sekarang," kata Bambang membuka obrolan dengan **Buletin Bappebti**, saat ditemui di Gudang SRG Kab. Pemalang beberapa waktu lalu.

Terpilihnya Bambang sebagai Ketua TMS tentu bukan tanpa alasan. Harus diakui dia sangat mumpuni di bidang pertanian. Alumni Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa- STPMD Yogyakarta ini pernah membentuk relawan kedaulatan pangan bersama teman-teman relawan Jokowi semasa Pilpres 2014 lalu. Dia juga pernah menjadi supervisor program upaya khusus tiga komoditas utama padi, jagung dan kedelai (pajale) dan menjadi koordinator

untuk Jawa Tengah.

Sebagai seorang yang lahir di lingkungan petani, dia memang sangat tertarik dengan segala hal yang menyangkut hidup petani. Menurutnya, di setiap jaman, petani selalu menjadi obyek politik. Sementara itu, nasib petani selalu marginal- terpinggirkan dibandingkan dengan sektor lain. "Hasil produksi dari petani yaitu beras dalam sejarahnya selalu menjadi bagian politik negara yang belum memberi jaminan kesejahteraan bagi petani," ungkapnya

Pria kelahiran tahun 1966 ini juga menceritakan perjalanan karirnya di dunia pertanian. "Berebel lulusan STM Pertanian, selepas kuliah pada tahun 1990, saya pernah mencoba bertani sayur," kenangnya. Saat itu, lanjut Bambang, untuk menghadapi harga yang tak menentu, dirinya mencoba membentuk kelompok Tani Sawi dan membangun kerjasama dengan Koperasi Industri & Kerajinan Rakyat- Kopinkra Mie Ayam Comal-Pemalang.

"Harga sawi yang kadang jatuh semasa panen raya hingga Rp 10 per kilogram, kami patok dengan harga rata-rata Rp 100 per kg," katanya. Sebaliknya, ketika musim kering di mana produksi sawi di daerah pegunungan sangat minim, harga disesuaikan hingga 70 % dari harga pasar.

Dua tahun kemudian, tanaman sawi akhirnya masuk sebagai tanaman alternatif bagi petani di daerah pesisir. Poktan Sawi ini pun melebarkan usahanya dalam budidaya tanaman hortikultura. "Kini, setelah saya pindah tempat tinggal ke Kota Pemalang sejak tahun 2011, Poktan itu menjadi koperasi pengelola pasar agropolitan Kab. Pemalang," ujarnya.

Solusi Petani

Dari kacamata Bambang Mugiarto, instrumen SRG secara konseptual merupakan jawaban atas dilema dan problem klasik petani. Menurutnya, salah satu masalah klasik petani yaitu soal harga saat panen raya.

Seperti diketahui, petani bisa menunda penjualan dan menyimpan

hasil panennya di gudang SRG saat harga gabah turun di waktu panen raya. Ketika harga gabah sudah stabil, petani bisa melakukan penjualan sehingga tidak mengalami kerugian. Selain itu, petani yang menyimpan komoditinya juga akan mendapatkan Resi Gudang yang dapat dijadikan agunan ke bank dengan bunga kredit yang rendah. Sehingga petani mendapatkan solusi pembiayaan yang cukup efektif.

Di samping itu, lanjut Bambang, masalah klasik petani di bidang budidaya yaitu masalah jion bibit dan sarana produksi pertanian- Saprotran yang memang belum dapat terjawab. Dia mengakui, masalah itu bukan menjadi bagian SRG, tapi menjadi otoritas Kementerian Pertanian.

Sayangnya, dia menilai program yang digelontorkan dinas pertanian, kerap kali dianggap program terpisah. Bukan menjadi program yang terintegrasi. "Itulah mengapa penting meminimalisir ego sektoral dan mengintegrasikan program pemerintah. Pembinaan di instansi terkait sangat mendesak. Ego sektoral instansi terkait menjadi salah satu kendala yg harus segera dibangun komitmennya," ungkap Bambang.

Adapun Koperasi TMS yang nantinya akan menjadi pengelola gudang telah melakukan berbagai upaya dan terobosan untuk mengemban amanat itu. Salah satunya yaitu dengan intervensi modal, sebagai upaya edukasi.

"Kami memberikan dana talangan untuk membeli gabah petani dengan harga sesuai pasaran. Kemudian, kami simpan di gudang SRG dengan resi atas nama petaninya. Pada saat harga tinggi, kami jual dengan bagi hasil dengan petani yang bersangkutan. Pola ini efektif, dan secara bertahap akan kami tingkatkan seiring dengan upaya penambahan



modal koperasi" beberrnya.

Selain itu, untuk tahun ini Koperasi TMS juga memiliki satu program. "Selain dalam tugas pokoknya, kami mencoba menjual beras sehat produksi anggota koperasi," kata pria yang hobi musik ini.

Di sisi lain, keluh Bambang, faktor kebiasaan perilaku dan masalah klasik yang dihadapi petani menjadi kendala implementasi SRG, dan memang masih membutuhkan proses untuk mengatasinya. Meski begitu, dia menilai, Kabupaten Pemalang memiliki potensi yang luar biasa untuk mengimplementasikan SRG. Sebab, Kab. Pemalang merupakan penyangga kebutuhan pangan di Provinsi Jawa Tengah.

"Saya berharap gudang SRG di Pemalang bisa menjadi solusi bagi petani dan membawa mereka menjadi lebih sejahtera," pungkas Bambang Mugiarto.

Customer Due Diligence Uji Tuntas Nasabah

Tindakan Pialang Berjangka



Identifikasi



Verifikasi



Pemantauan

(Peraturan Kepala Bappebti No. 2 Tahun 2016)

www.bappebti.go.id